



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT
PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Dosen Dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Nia Audina

NPM. 21901082011

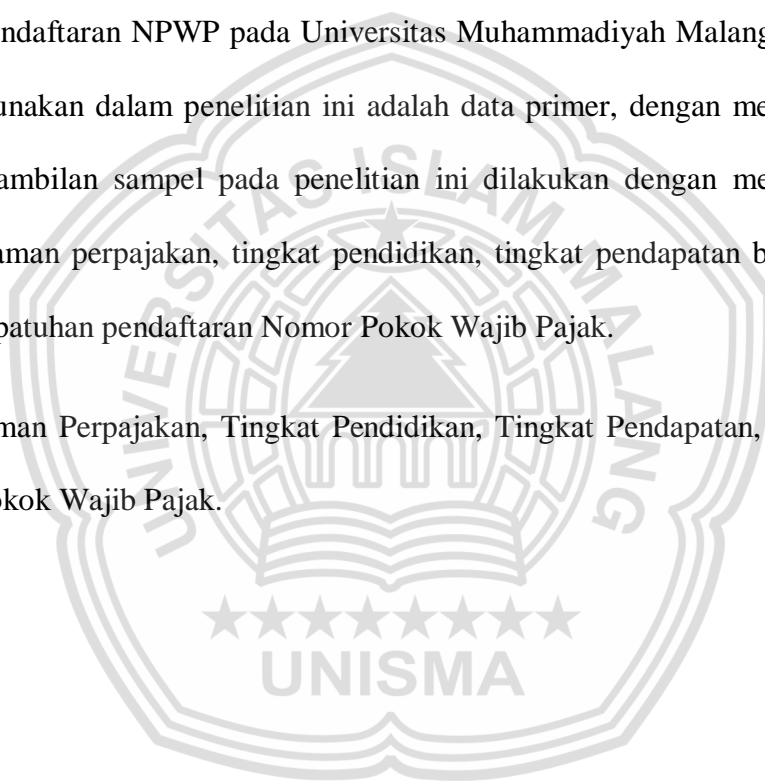


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2023**

ABSTRAK

Saat ini hampir banyak pengusaha yang mewajibkan karyawannya memiliki NPWP untuk memudahkan administrasi perpajakan. Dengan adanya NPWP akan memudahkan kita dalam menangani permohonan administrasi seperti pada bank. Beberapa lembaga perbankan saat ini mewajibkan pemasukan nomor NPWP sebagai salah satu persyaratan utama atau persyaratan dokumentasi pendukung dalam proses administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pendaftaran NPWP pada Universitas Muhammadiyah Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menggunakan data kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. Pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.

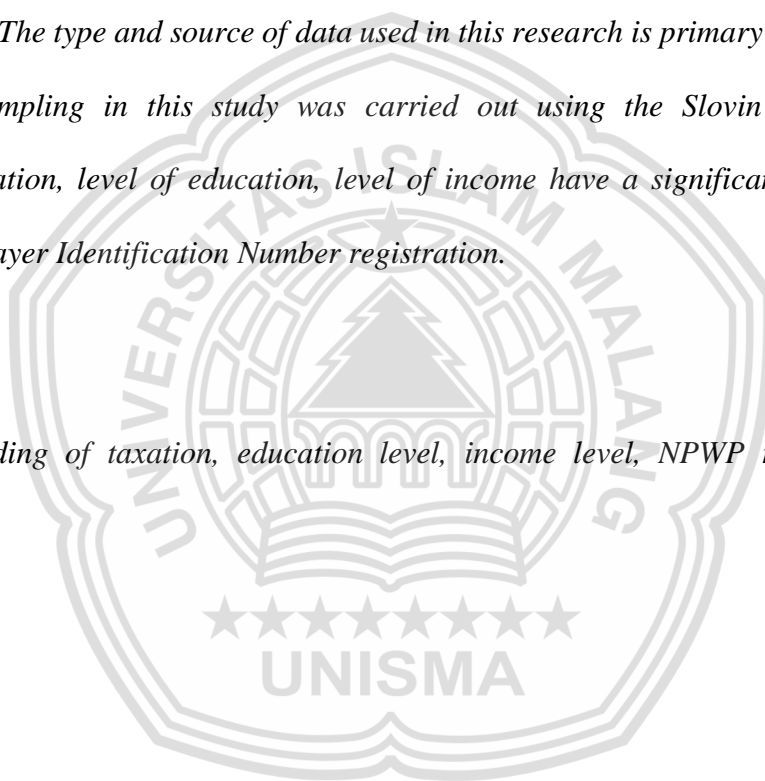
Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.



ABSTRACT

Currently, almost many employers require their employees to have a NPWP to facilitate tax administration. With a NPWP, it will make it easier for us to handle administrative requests, such as at a bank. Several banking institutions currently require the entry of a NPWP number as one of the main requirements or supporting documentation requirements for administrative processing. The aim of this research is to determine the effect of understanding taxation, education level, income level on NPWP registration compliance at Muhammadiyah University in Malang. The type and source of data used in this research is primary data, using quantitative data. Sampling in this study was carried out using the Slovin technique. Understanding of taxation, level of education, level of income have a significant effect on compliance with Taxpayer Identification Number registration.

Keywords: understanding of taxation, education level, income level, NPWP registration compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran NPWP telah diatur dalam peraturan Menteri keuangan (KMK) NOMOR 59/PMK. 03/2022 sebagai perubahan atas PMK nomor 231/PMK. 03/2019. Namun ketentuan mengenai NPWP juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK. Saat ini hampir banyak pengusaha yang mewajibkan karwannya memiliki NPWP untuk memudahkan administrasi perpajakan. Dengan adanya NPWP, maka akan memudahkan kita untuk mengurus permohonan administrasi, seperti dibank. Beberapa institusi perbankan saat ini mensyaratkan pemasukan nomor NPWP sebagai salah satu persyaratan utama atau persyaratan dokumentasi pendukung untuk pengurusan administrasi. Jumlah orang yang ber-NPWP dimalang pada tahun 2016 sejumlah 198.080, tahun 2017 sejumlah 213.145, tahun 2018 sejumlah 243.353 sedangkan jumlah penduduk dimalang pada tahun 2016 sejumlah 856.410, tahun 2017 sejumlah 861.414, tahun 2018 sejumlah 866.118. dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang memiliki npwp tidak ada setengah dari seluruh jumlah penduduk yang ada dimalang (Prilia, 2022).

Meskipun masyarakat umum sudah mengenal pajak, masih banyak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk kewajiban melaporkan penghasilan. Dengan kata lain, pengetahuan dan pemahaman pajak sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang paham akan pajak, akan

melakukan kewajiban sebagai wajib pajak karena tau manfaat dari membayar pajak. Beberapa faktor yang menjadi dasar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain peraturan wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan dan pemahaman tentang kualitas pelayanan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat. Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system dan self assessment system. Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system dan self assessment system. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Sistem-sistem perpajakan ada 3 yaitu: hukum pajak (*tax law*), kebijakan perpajakan (*tax policy*), taks administrasi (*tax administration*). Hukum pajak yaitu mencakup semua aturan perundang-undangan yang harus mengatur hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Kebijakan perpajakan yaitu bagian penting yang ada didalam system perpajakan, berupa perencanaan, program-program maupun keputusan yang dirumuskan agar bisa mencapai tujuan optimalitas penerimaan pajak. Taks administrasi yaitu proses yang dinamis secara terus menerus didalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan sumber daya manusia, baik fiskus maupun wajib pajak untuk mencapai optimalitas realisasi penerimaan pajak.

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari

Pendidikan siswa dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kesadaran akan kepatuhan wajib pajak secara umum. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk beluk pajak selama menempuh Pendidikan tersebut. Semua wajib pajak harus mendapatkan pendidikan perpajakan sehingga mereka memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik.

Salah satu alasan mengapa pembayar pajak menghasilkan uang adalah tingkat pendapatan mereka. Penghasilan yang diperoleh seseorang yang bekerja dan mendapatkan uang untuk dibelanjakan Penuhi kebutuhan seseorang terlebih dahulu. Pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, sehingga pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, ketika wajib pajak memiliki uang. Tingkat pendapatan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu penulis berinisiatif untuk menambah dua variabel baru yaitu Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan sebagai variabel independen. Menurut (Cahyani & Noviari, 2019) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial. artinya wajib pajak UMKM tentu saja harus memiliki pemahaman perpajakan yang baik tentang peraturan ini, terutama mengenai penurunan tarif final sebesar 0,5%. Perubahan peraturan ini akan memudahkan wajib pajak wajib pajak UMKM dalam menghitung dan membayar pajak setiap bulannya. sedangkan menurut (Sondakh et al., 2019) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Manado. Masalah kecurangan pajak sering terjadi di semua bidang administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya insiden penggelapan uang wajib pajak oleh pemungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak segan-segan melakukan penghindaran pajak dengan anggapan beban pajaknya tidak akan terpenuhi. Menurut (Putri et al., 2022) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpendidikan tentunya memiliki kesadaran akan kewajiban menjadi wajib pajak, tetapi orang yang berpendidikan rendah pun belum tentu tidak patuh dalam kewajiban menjadi wajib pajak. Maka dari itu tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sedangkan menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022) tingkat Pendidikan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. seseorang yang berpendidikan, maka semakin berkembang pula pikiran dan perilakunya. tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesadaran pajak masyarakat. Karena semakin banyak wawasan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran seseorang tersebut. Menurut (Putri et al., 2022) Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada dibawah dari penghasilan yang mereka peroleh. sedangkan sedangkan menurut (Ariana, 2016) tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era covid-19 dikabupaten jombang. Menurut (Prilia, 2022) Nomor Pokok wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian



dengan mengambil judul Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan terhadap Kepatuhan pendaftaran NPWP. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran NPWP.
2. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran NPWP.
3. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran NPWP.
4. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran NPWP.

5.2. Keterbatasan penelitian

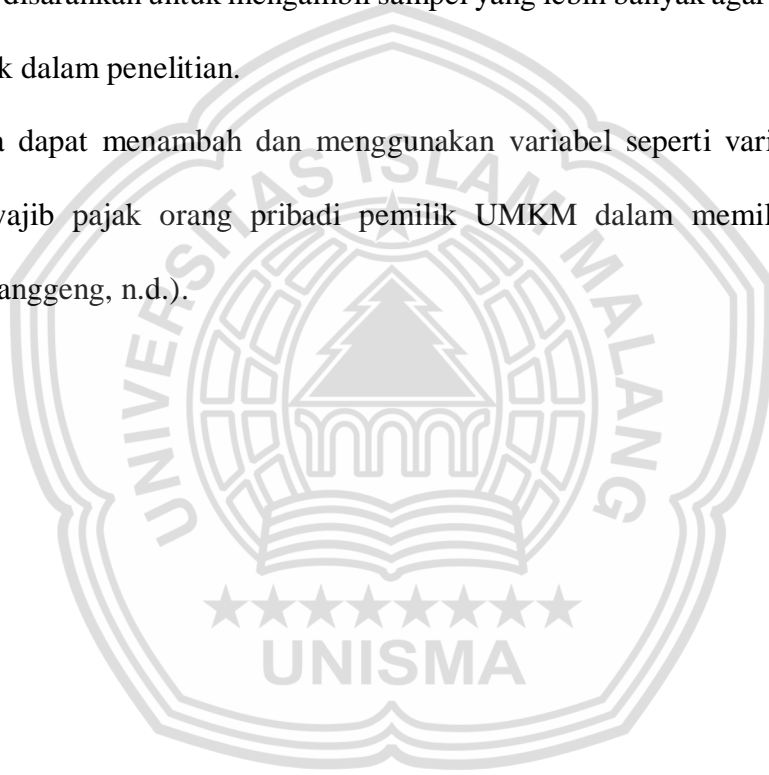
Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner yang tidak dapat memberikan informasi yang di berikan dari setiap responden secara mendalam.
2. Jumlah responden hanya berjumlah 99 orang yang masih kurangnya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kepatuhan pendaftaran NPWP.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan metode pengumpulan data tambahan selain kuisioner, seperti observasi dan wawancara secara langsung agar data yang dikumpulkan lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak agar keakuratan data dapat lebih baik dalam penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah dan menggunakan variabel seperti variabel wajib pajak kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Rizqiana, Asrofi Langgeng, n.d.).



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun* 149–200.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, Ezer, E. (2017). *Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Pajak Jawa)*.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–119.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. 1(1), 47–54.
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang).
- Murti, W., Borobudur, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Pajak, O. (2022). *Trilogi accounting and business research*. 03(01), 80–97.
- Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Permana, D. A., & Jaya, A. (2020). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib*. 2(1), 58–73.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*
- Pratiwi. (2021). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*.
- Prilia, S. (2022). *Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas*
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putri, L. R. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat*. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016*.
- Putri, W. P. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. *Journal of Accounting*, 5(1).
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva,

- C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019a). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memiliki NPWP (Studi. Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), S2–S3.
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019b). Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Progress in Retinal and Eye Research,
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Rizal, Muhammad & Gulo, F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekonomika.
- Rizqiana, Asrofi Langgeng, H. M. (n.d.). Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP Fida.
- Rosmawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. <https://Medium.Com/.https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3), 3109–3118.
- Sri Lestari Yuli Prastyatini, W. R. (1875). Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi. 35(1), 116–132.
- Stella Rahma. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Verena, Deborah., Bambang Sugiarto., W., & Fery. (2023). Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepemilikan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Pada Transaksi E-Commerce Pendahuluan disediakan juga beragam , mulai dari contohnya menunjukkan.
- Wahyu, J. S. (n.d.). Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak. 18(2), 109–130.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Literasi Akuntansi, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>